

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Faizal Amir

STIT Buntet Pesantren Cirebon
faizalamir25@gmail.com

Muhamad Mujadid

STIT Buntet Pesantren Cirebon
muhamad.mujadid@gmail.com

Moh Saiful Bakhril Amin

STIT Buntet Pesantren Cirebon
Saifulmtk0802@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the policy dynamics behind the study tour ban issued by the Governor of West Java and compare it with the approach taken by the Ministry of Primary and Secondary Education. Using a qualitative-descriptive approach and grounded in several theoretical frameworks—including the Policy Cycle Theory, Multiple Streams Framework (MSF), Asymmetric Decentralization and Intergovernmental Relations (IGR), Contextual Teaching and Learning (CTL), Experiential Learning, Critical Theory in Education, and the Advocacy Coalition Framework (ACF)—this research finds that the policy divergence stems from differences in policy stages, central-local government dynamics, and conflicting values between pedagogical goals and social justice concerns. A survey of 62 respondents comprising teachers, school principals, retired educators, and education officials reveals that most support out-of-school learning activities, provided they are educational, affordable, safe, and inclusive. The findings suggest that a total ban on study tours contradicts the principles of contextual learning and character education. Therefore, a redefinition of study tours as structured educational visits is necessary, along with improved policy coordination between central and regional authorities to realize an equitable, relevant, and student-centered education policy.

Keywords: *study tour, education policy, decentralization, public policy theory, social justice, contextual learning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan larangan study tour di Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur dan membandingkannya dengan pendekatan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kerangka teori yang meliputi Policy Cycle Theory, Multiple Streams Framework (MSF), Desentralisasi dan Intergovernmental Relations (IGR), Contextual Teaching and Learning (CTL), Experiential Learning, Teori Kritis dalam Pendidikan, serta Advocacy Coalition Framework (ACF), penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tahapan kebijakan, dinamika relasi pusat-daerah, serta benturan nilai antara kepentingan pedagogis dan keadilan sosial. Hasil survei terhadap 62 responden yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pensiunan pendidik, dan pejabat dinas pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas

mendukung kegiatan belajar di luar kelas dengan catatan edukatif, murah, aman, dan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan total study tour tidak sejalan dengan semangat pembelajaran kontekstual dan pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi konsep study tour menjadi kunjungan edukatif yang terarah, serta koordinasi kebijakan yang adaptif antara pusat dan daerah untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang adil, relevan, dan berpihak pada seluruh peserta didik.

Kata Kunci: *study tour, kebijakan pendidikan, desentralisasi, teori kebijakan publik, keadilan sosial, pembelajaran kontekstual*

Pendahuluan

Study tour atau tur belajar merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bertujuan memperluas wawasan, meningkatkan pengalaman belajar langsung, serta memperkuat pengembangan karakter peserta didik (Miao & Harris, 2012; Swanson, 2022). Dalam praktiknya, kegiatan ini telah menjadi bagian dari strategi pembelajaran integratif di berbagai jenjang pendidikan. Namun, pelaksanaan *study tour* di Indonesia belakangan ini menghadapi tantangan signifikan, terutama akibat perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Dabamona, 2020; Marpaung et al., 2022)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 42/PK.03.04/KESRA dan diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 8 Mei 2024, membatasi pelaksanaan kegiatan non-kurikuler seperti *study tour, outing class, wisuda, dan kegiatan seremonial lain yang dinilai berbiaya tinggi*. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SLB di wilayah Jabar. Tujuan utamanya adalah melindungi hak peserta didik, menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Dalam konteks *study tour*, kegiatan ini hanya diizinkan jika dilakukan di dalam

wilayah Jawa Barat dan memiliki nilai edukatif yang jelas, seperti kunjungan ke pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, pusat kebudayaan, atau destinasi wisata edukatif lokal.

Berbeda dengan pendekatan Pemprov Jabar yang cenderung restriktif, Kementerian Pendidikan melalui pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak melarang pelaksanaan *study tour* selama keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kecelakaan tragis bus SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang menelan korban jiwa. Dalam hal ini, Mendikdasmen justru menekankan pentingnya prosedur keselamatan, kelayakan kendaraan, dan pengawasan yang sistematis.

Perbedaan pendekatan ini memunculkan ketegangan dan kebingungan di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa menghadapi dilema: di satu sisi, kegiatan *study tour* diyakini bermanfaat dalam mendukung pembelajaran kontekstual dan penguatan karakter siswa (Zen et al., 2022) di sisi lain, pembatasan administratif dan geografis mengekang fleksibilitas pelaksanaannya. Ketidaksinkronan kebijakan ini mencerminkan tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan

ruang bagi penyesuaian kebijakan berbasis lokal (Imanirih, 2015).

Fenomena ketidakharmonisan ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas dimensi pedagogis, sosial, ekonomi, dan ideologis dalam kebijakan *study tour*, sebagaimana tercermin dalam berbagai penelitian terdahulu. (Zhu et al., 2021), dalam penelitiannya di Tiongkok, menunjukkan bahwa *study tour* dapat dirancang sebagai strategi pendidikan karakter dan pembentukan identitas kebangsaan jika kebijakan dirancang secara sistematis dan terarah. El Baradei et al. (n.d.) menambahkan bahwa *study tour* mampu menjadi pendekatan pedagogis inovatif yang memperkuat kemampuan sosial-politik siswa, bukan sekadar rekreasi.

Sementara itu, penelitian (Ieong, 2024) di Makau menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memformulasi kebijakan *study tour* yang sesuai dengan konteks kultural dan geopolitik lokal. Hal ini paralel dengan situasi di Indonesia, di mana perbedaan pendekatan antara Pemprov Jabar dan Kemendikbudristek menggambarkan adanya dinamika lokalisasi kebijakan pendidikan nasional. Di sisi lain, (Hains-Wesson & Appleby, 2017) menunjukkan adanya risiko komersialisasi dalam pelaksanaan *study tour*, khususnya ketika dikelola oleh pihak ketiga. Situasi ini juga menjadi salah satu latar belakang munculnya kekhawatiran masyarakat dan pembatasan oleh pemerintah daerah.

Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa studi tour tidak semata menjadi urusan logistik atau kegiatan pelengkap kurikulum, tetapi memiliki dimensi strategis dalam membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan antara

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memaknai dan mengatur *study tour* mencerminkan dua kutub pemikiran: antara perlindungan dan pengendalian versus penguatan pendidikan kontekstual. Ketegangan ini menunjukkan perlunya artikulasi ulang arah kebijakan pendidikan non-kurikuler yang lebih responsif dan sinergis.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan penting: Quo vadis kebijakan *study tour* sekolah? Ke mana arah kebijakan ini akan bergerak di tengah perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah? Dengan menganalisis dinamika relasi antar level pemerintahan, pendekatan kebijakan yang diambil, serta dampaknya terhadap praktik pendidikan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap formulasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, aman, dan bermakna.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan perspektif dalam kebijakan terkait kegiatan *study tour* sekolah antara Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lexy J. Moeleong, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam, dengan fokus pada makna, narasi, dan dinamika kebijakan yang berkembang (Sugiyono, 2015).

Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis isi kebijakan larangan *study tour* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kebijakan penguatan pembelajaran kontekstual dan

pengembangan Profil Pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Kementerian. Penelitian ini juga menelaah dasar pertimbangan, tujuan, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut (Imam Gunawan, 2017).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder (Afrizal, 2014; Setyosari, 2016). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, serta perwakilan orang tua siswa. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen kebijakan resmi, surat edaran, panduan teknis, berita media, serta pernyataan publik dari pejabat terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, serta observasi pasif terhadap situasi di sekolah, jika memungkinkan (Mulyana et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Proses ini mencakup transkripsi data, pengkodean tema-tema utama, kategorisasi, serta interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan perspektif dalam kebijakan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan member checking kepada informan yang telah diwawancara (Rivaldi et al., 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika perbedaan kebijakan study tour antara pemerintah daerah dan pusat, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Teori Kebijakan Publik

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Teori Siklus Kebijakan (Policy Cycle Theory) dan Multiple Streams Framework (MSF) menawarkan dua pendekatan berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika pembuatan kebijakan publik. Teori Siklus Kebijakan, yang pertama kali dikenalkan oleh Harold D. Lasswell dan dikembangkan oleh ilmuwan kebijakan seperti James E. Anderson dan Thomas R. Dye, menganggap kebijakan publik sebagai rangkaian tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan (Jann & Wegrich, 2017). Siklus kebijakan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang rasional dan terukur. Dalam konteks kebijakan larangan study tour yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan panduan dari Kemendikbudristek, teori ini berguna untuk mengidentifikasi di mana kebijakan tersebut berada dalam tahapan siklus, apakah dalam tahap formulasi, adopsi, implementasi, atau evaluasi (Powell & Mannion, 2022).

Sementara itu, *Multiple Streams Framework* (MSF) yang diperkenalkan oleh John W. Kingdon menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan terjadi ketika tiga arus utama yakni arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*politics stream*) bertemu dalam suatu jendela peluang (Malandrino, 2023). Arus masalah mencakup isu yang dianggap penting dan mendesak, yang dapat muncul akibat indikator statistik, krisis, atau sorotan media. Arus kebijakan berisi berbagai alternatif solusi yang telah dirumuskan oleh komunitas kebijakan, sementara arus politik mencakup dinamika politik yang memengaruhi keputusan kebijakan. Ketika

Faizal Amir, Muhamad Mujadid,
Moh. Saiful Bakhri Amin

ketiga arus ini bertemu dan terdapat kondisi yang mendukung, terbuka peluang bagi perubahan kebijakan. Dalam kasus kebijakan larangan study tour, MSF dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kejadian viral, seperti kecelakaan yang melibatkan pelajar, dapat memicu munculnya kebijakan baru melalui terbukanya policy window (Zohlnhöfer et al., 2022). Selain itu, peran policy entrepreneurs, aktor yang memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong perubahan kebijakan, sangat penting dalam memobilisasi ide dan membangun koalisi yang mendukung.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana kebijakan publik dibentuk, baik melalui proses tahapan yang sistematis dalam siklus kebijakan maupun melalui interaksi dinamis antara berbagai arus dalam MSF yang menciptakan peluang untuk perubahan. Dengan memahami keduanya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan seperti larangan *study tour* dapat dihasilkan dan bagaimana berbagai faktor yang berbeda, seperti masalah sosial, ide kebijakan, dan dinamika politik, berperan dalam pembentukannya.

Teori Desentralisasi dan Relasi Pusat-Daerah

Teori Desentralisasi Asimetris dan Teori *Intergovernmental Relations* (IGR) keduanya memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan kebijakan publik. Teori Desentralisasi Asimetris menjelaskan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah dalam suatu negara, berdasarkan kondisi, kapasitas, dan

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Berbeda dengan desentralisasi simetris yang memberikan kewenangan merata ke seluruh daerah, desentralisasi asimetris memberikan otonomi lebih besar kepada daerah tertentu, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Papua di Indonesia (Rahmatunnisa et al., 2018). Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan potensi setempat, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional (Bergh, 2015). Dalam hal ini, kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat dapat membuat kebijakan berbeda dari panduan kementerian, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi nasional.

Di sisi lain, Teori *Intergovernmental Relations* (IGR) mengkaji dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. IGR menyoroti bagaimana hubungan antarpemerintah ini bisa bersifat koordinatif, konsultatif, kolaboratif, atau bahkan konflik, tergantung pada struktur institusi dan kepentingan politik masing-masing pihak (Stoker, 1995). Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk memahami bagaimana desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang saling terkait. Meskipun daerah memiliki otonomi, kebijakan strategis tetap memerlukan koordinasi antara level pemerintahan yang berbeda. Dalam kasus kebijakan larangan *study tour*, misalnya, teori IGR bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan

daerah yang berbeda dengan panduan kementerian apakah hubungan tersebut bersifat koordinatif ataukah menunjukkan adanya ketegangan vertikal yang memperlihatkan perbedaan interpretasi kebijakan antara pusat dan daerah (Ibrahim, 2021).

Dengan memahami kedua teori ini, kita dapat menggambarkan bagaimana kebijakan publik dapat berkembang dalam kerangka hubungan yang fleksibel namun tetap mengedepankan integrasi nasional, baik melalui desentralisasi yang memperhatikan kearifan lokal, maupun mekanisme interaksi antar pemerintah yang adaptif dan dinamis.

Teori Pendidikan Kontekstual

Teori *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan *Experiential Learning* (Kolb) keduanya menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung dan relevansi materi dengan kehidupan nyata siswa, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. *Contextual Teaching and Learning* (CTL) mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Teori ini mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, yang sejalan dengan tujuan pengembangan Profil Pelajar Pancasila, seperti berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan berempati (Anggraini & Ulfah, 2022). Salah satu metode yang mendukung *Contextual Teaching and Learning* CTL adalah kegiatan *study tour*, yang memberikan siswa kesempatan untuk mengamati, bertanya, dan berinteraksi dengan lingkungan nyata di luar kelas. Melalui *study tour*, siswa dapat mengaitkan apa

yang mereka pelajari di kelas dengan dunia nyata, memperkuat pemahaman mereka, serta membangun keterampilan sosial dan emosional (Bafadal, 2019).

Di sisi lain, teori *Experiential Learning* yang dikembangkan oleh David A. Kolb menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang kemudian direfleksikan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Kolb mengusulkan siklus empat tahap pembelajaran: pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan penerapan dalam situasi baru (Kolb, 2014). Pendekatan ini menganggap pembelajaran lebih bermakna ketika siswa terlibat langsung dalam aktivitas yang relevan dan merefleksikan pengalaman tersebut untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam konteks ini, *study tour* sebagai implementasi dari *Experiential Learning* memberikan pengalaman langsung bagi siswa untuk mengamati objek pembelajaran di dunia nyata, berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, serta merefleksikan dan mendiskusikan pengalaman tersebut. Proses ini memperkuat pemahaman akademik siswa dan membekali mereka dengan keterampilan interpersonal dan intrapersonal yang penting (Sun & Xu, 2021).

Kedua teori ini, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan *Experiential Learning*, sangat relevan dalam konteks pendidikan karakter dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Keduanya mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih aplikatif, bermakna, dan holistik. Melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman

seperti study tour, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata.

Teori Kritis dalam Pendidikan

Teori Kritis dalam pendidikan memberikan perspektif penting tentang bagaimana kebijakan yang tidak adil atau berorientasi pada keuntungan dapat memperburuk ketimpangan sosial di dalam masyarakat (Ryoo & Crawford, 2023). Dengan menganalisis kegiatan *study tour* dari sudut pandang ini, kita dapat memahami lebih dalam dampak eksklusi sosial yang mungkin terjadi, serta pentingnya menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Teori Kritis dalam pendidikan, yang dipengaruhi oleh pemikiran dari para filsuf seperti Paulo Freire (Ayoub Mahmoudi et al., 2014), Henry Giroux (Mariani, 2020), dan Jurgen Habermas (Müller-Doohm, 2017), berfokus pada analisis terhadap struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Teori ini melihat pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai arena sosial di mana kekuatan dan dominasi dalam masyarakat dapat dipertahankan atau diubah. Dalam pandangan teori kritis, pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk pembebasan dan perubahan sosial, yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya (Apple, 2019).

Salah satu konsep penting dalam teori kritis adalah ketimpangan sosial dalam pendidikan, di mana sistem pendidikan sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

(Benadusi, 2001). Ketimpangan ini tidak hanya muncul dalam bentuk akses terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi atau bisnis yang dapat mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendidikan, dalam hal ini, tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen untuk pemberdayaan, tetapi juga sebagai arena di mana nilai-nilai kapitalisme dan individualisme dipromosikan, yang dapat memperburuk marginalisasi sosial (Simatele, 2022).

Dalam konteks ini, kegiatan *study tour* dapat dilihat sebagai salah satu manifestasi dari ketimpangan sosial dalam pendidikan. Kegiatan tersebut, yang seharusnya menjadi bagian dari pengalaman belajar yang memperkaya wawasan dan pengembangan karakter siswa, sering kali berubah menjadi komoditas yang dipandang sebagai layanan yang harus dibayar oleh orang tua siswa. Sekolah-sekolah yang mengenakan biaya tinggi untuk kegiatan *study tour* sering kali tidak mempertimbangkan ketidakmampuan ekonomi keluarga siswa, sehingga kegiatan tersebut menjadi eksklusif dan terbatas hanya bagi siswa dari keluarga yang mampu secara finansial (Miao & Harris, 2012).

Dari perspektif teori kritis, kebijakan yang berorientasi pada keuntungan atau bisnis dalam pendidikan, seperti komersialisasi *study tour*, bisa dianggap sebagai bentuk eksplorasi terhadap kelompok yang kurang mampu. Ketika kegiatan ini dijadikan produk yang harus dibayar, ini memperburuk ketimpangan antara siswa dari keluarga kaya dan keluarga miskin, serta menciptakan jurang sosial di kalangan pelajar. Siswa dari

keluarga kurang mampu mungkin merasa terpinggirkan atau terabaikan karena tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, yang seharusnya menjadi bagian dari pengalaman pendidikan yang setara bagi semua siswa (Inglis, 2023).

Eksklusi sosial dalam pendidikan juga bisa terlihat dalam dampak psikologis yang ditimbulkan pada siswa yang tidak mampu mengikuti *study tour*. Ketika siswa lain memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung di luar kelas, siswa yang tidak mampu bisa merasa terisolasi atau bahkan menderita, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga diri dan motivasi mereka dalam belajar. Oleh karena itu, kebijakan *study tour* yang mengutamakan keuntungan dan tidak mempertimbangkan keadilan sosial dapat memperkuat struktur ketidaksetaraan yang ada, baik di tingkat sekolah maupun dalam masyarakat secara lebih luas (Meral et al., 2023).

Teori kritis dalam pendidikan menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemberdayaan dalam setiap kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, *study tour* seharusnya dilihat bukan hanya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menciptakan inklusi sosial bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghalangi tercapainya tujuan pendidikan yang adil dan setara (Strunk & Betties, 2019).

Dengan demikian, dari perspektif teori kritis, penting untuk mendekati kebijakan *study tour* dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

eksklusi sosial dan ketimpangan yang mungkin timbul. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan, bukan memperburuknya. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus bersifat inklusif, memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pengalaman belajar yang berharga seperti *study tour*.

Model Analisis Konflik Kebijakan (Advocacy Coalition Framework)

Advocacy Coalition Framework (ACF), yang dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith pada awal 1980-an, memberikan pendekatan yang berguna untuk memahami bagaimana kebijakan publik terbentuk dan berubah dalam sistem politik yang kompleks (Djafar & Ap, 2024). *Advocacy Coalition Framework* (ACF) berfokus pada peran koalisi aktor yang memiliki nilai, kepentingan, dan pandangan dunia yang berbeda dalam mempengaruhi arah kebijakan. Koalisi ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu meskipun memiliki pandangan yang beragam mengenai detil implementasi kebijakan tersebut (Pierce et al., 2022).

Teori ini mengidentifikasi tiga lapisan keyakinan yang membentuk pandangan aktor kebijakan: *deep core beliefs* (keyakinan mendalam), *policy core beliefs* (keyakinan inti terkait kebijakan), dan *secondary beliefs* (keyakinan teknis yang lebih fleksibel). Meskipun koalisi dengan nilai yang berbeda ini bersaing untuk mempengaruhi kebijakan, *Advocacy Coalition Framework* (ACF) juga

menunjukkan bahwa mereka dapat berkolaborasi ketika ada titik temu dalam tujuan atau ketika faktor eksternal seperti perubahan sosial atau krisis membuka peluang untuk perubahan kebijakan, yang disebut sebagai *policy window* (Sabatier & Weible, 2019).

Selain itu, *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menyoroti pentingnya policy subsystem, yaitu arena di mana aktor-aktor kebijakan saling berinteraksi dan berkompetisi. Meskipun perubahan kebijakan sering kali terjadi dalam jangka panjang, *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menggarisbawahi bahwa koalisi advokasi berusaha untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai saluran, termasuk lobby, debat publik, dan pembentukan opini. Kerangka kerja ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai dinamika kebijakan dalam isu-isu kompleks, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, di mana kompetisi antar koalisi dengan pandangan berbeda sering memengaruhi keputusan kebijakan yang diambil. Melalui *Advocacy Coalition Framework* (ACF), kita bisa lebih memahami mengapa kebijakan tertentu diterima atau ditolak, serta bagaimana perubahan kebijakan bisa tercapai dalam konteks yang dinamis dan penuh persaingan (Weible & Jenkins-Smith, 2016).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei terhadap 62 responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pensiunan pendidik, dan pejabat dinas, ditemukan bahwa mayoritas responden (sekitar 55%) menyatakan setuju terhadap kegiatan *study tour*, sementara sekitar 42% menyatakan tidak setuju, dan sisanya menyatakan setuju dengan syarat

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

tertentu. Alasan utama mereka yang mendukung *study tour* adalah karena kegiatan ini dianggap dapat memberikan pengalaman belajar di luar kelas, memperluas wawasan siswa, mengurangi kejemuhan, memperkuat empati sosial, dan mempererat hubungan antar siswa. Banyak juga yang melihat nilai edukatif dari kunjungan ke museum, situs sejarah, dan alam sebagai bagian dari penguatan pembelajaran kontekstual.

Namun demikian, sejumlah besar responden yang menolak *study tour* menyampaikan bahwa kegiatan ini kerap tidak sejalan dengan tujuan pendidikan. Mereka memandang *study tour* hanya sebagai kegiatan jalan-jalan yang mahal, membebani orang tua, dan minim nilai edukasi. Beberapa juga mengkhawatirkan keselamatan siswa, serta menilai bahwa kegiatan tersebut rawan menjadi ajang komersialisasi oleh sekolah. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan adanya kegiatan alternatif yang lebih lokal, murah, dan fokus pada pembelajaran seperti kunjungan ke museum terdekat, tempat kerja orang tua, atau *long march* edukatif.

Terkait kebijakan larangan *study tour* di Jawa Barat dan dikursus nasional, hampir semua responden mengetahui adanya larangan tersebut. Sekitar 80–85% menyatakan setuju dengan larangan, dengan catatan bahwa pemerintah perlu memberi alternatif atau solusi lain yang tetap mendukung pembelajaran di luar kelas. Sebagian besar berharap larangan ini tidak bersifat absolut, tetapi diarahkan untuk membatasi kegiatan yang konsumtif dan tidak relevan dengan kurikulum. Banyak juga yang mendorong agar kegiatan tetap ada namun dengan penyesuaian, seperti memperjelas tujuan, melibatkan orang tua dalam perencanaan, serta

Faizal Amir, Muhamad Mujadid,
Moh. Saiful Bakhri Amin

menjamin transparansi biaya dan keamanan.

Sebagai kesimpulan, responden secara umum mendukung kegiatan belajar di luar kelas selama tujuan edukatifnya jelas, biayanya tidak memberatkan, dan dirancang dengan melibatkan semua pihak. Rekomendasi utama yang muncul adalah redefinisi istilah *study tour* menjadi “kunjungan edukatif”, penerapan kebijakan yang fleksibel dan berpihak pada kondisi ekonomi peserta didik, serta perlunya musyawarah antara sekolah, orang tua, dan pemerintah sebelum kegiatan dilaksanakan. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi pembuat aturan, tetapi juga fasilitator yang menyediakan pedoman teknis yang tidak membingungkan serta mendukung program yang relevan dan aman bagi siswa.

Perbedaan kebijakan antara Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait *study tour* mencerminkan dinamika kompleks dalam proses kebijakan publik di Indonesia. Jika ditinjau dari perspektif *Policy Cycle Theory*, kebijakan Gubernur Jawa Barat tampaknya sudah memasuki tahap implementasi sebagai respons cepat terhadap situasi darurat, seperti kecelakaan pelajar. Sementara itu, Kemendikbudristek masih berada dalam tahap formulasi atau pengembangan panduan yang bersifat preventif dan tidak melarang sepenuhnya. Perbedaan ini menunjukkan ketidaksinkronan dalam tahapan siklus kebijakan yang dapat membingungkan pelaksana di lapangan.

Melalui pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF), kita dapat memahami bahwa peristiwa tragis yang menimpa siswa menjadi pemicu terbukanya policy window, yaitu ketika arus masalah (kecelakaan), arus kebijakan (usulan larangan), dan arus

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

politik (tekanan publik dan media) bertemu. Dalam konteks ini, Gubernur berperan sebagai *policy entrepreneur* yang mengambil inisiatif kebijakan segera. Di sisi lain, Kemendikbudristek lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan pedagogis dan sosial.

Perbedaan pendekatan ini juga dapat dianalisis menggunakan Teori Desentralisasi dan Intergovernmental Relations (IGR). Sebagai bentuk desentralisasi asimetris, Gubernur Jawa Barat memiliki kewenangan membuat kebijakan lokal sesuai konteks daerahnya, selama tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Namun, dari perspektif IGR, perbedaan kebijakan ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya ruang konsultatif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dari sisi pedagogis, teori *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan *Experiential Learning* menunjukkan bahwa kegiatan seperti *study tour* sebenarnya memiliki nilai edukatif tinggi karena memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi siswa. Kegiatan ini sejalan dengan semangat penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, pelaksanaannya harus dikaji ulang agar tidak bersifat konsumtif dan tetap aman serta inklusif. Oleh karena itu, pelarangan total tanpa memberikan alternatif berisiko menurunkan kualitas pembelajaran kontekstual yang seharusnya diterapkan.

Lebih lanjut, dari perspektif Teori Kritis dalam Pendidikan, *study tour* yang berbiaya tinggi dan cenderung dikomersialisasi menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan. Ketika kegiatan ini hanya dapat diikuti oleh siswa dari keluarga mampu,

maka pendidikan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan. Dalam konteks ini, larangan Gubernur bisa dibaca sebagai upaya melindungi kelompok rentan dari eksklusi sosial. Namun demikian, solusi kebijakan tidak bisa berhenti pada pelarangan, melainkan harus diarahkan pada penyediaan kegiatan edukatif alternatif yang setara dan dapat diakses semua siswa.

Kerangka *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dapat menjelaskan bagaimana pandangan publik terbelah dalam dua koalisi: pihak yang mendukung *study tour* karena nilai edukatifnya, dan pihak yang menolak karena alasan biaya, keselamatan, serta potensi komersialisasi. Data survei terhadap 62 responden menunjukkan bahwa meski mayoritas setuju terhadap *study tour*, banyak pula yang mengusulkan revisi bentuk kegiatannya agar lebih edukatif dan inklusif. Perubahan kebijakan dapat tercapai apabila kedua koalisi ini menemukan titik temu dalam bentuk redefinisi kegiatan sebagai “kunjungan edukatif” yang lebih terarah dan adil.

Dengan demikian, perbedaan kebijakan antara Gubernur Jawa Barat dan Kemendikbudristek bukan sekadar perbedaan pandangan administratif, tetapi mencerminkan perbedaan dalam kerangka teoritik, nilai, dan strategi kebijakan. Quo vadis kebijakan *study tour* sekolah? Jawabannya terletak pada kemampuan pemerintah untuk menyusun kebijakan kolaboratif yang tidak hanya responsif terhadap kondisi sosial, tetapi juga menjamin keadilan, relevansi pedagogis, dan keamanan bagi seluruh siswa. *Study tour* tidak perlu dihapuskan, tetapi harus ditransformasikan menjadi bentuk pembelajaran kontekstual yang inklusif,

Quovadis Kebijakan Study Tour Sekolah? Sebuah Perbedaan Perspektif Antara Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

bermakna, dan selaras dengan cita-cita pendidikan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengatur kegiatan *study tour* mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam merespons isu pendidikan berbasis pengalaman. Mengacu pada *Policy Cycle Theory*, kebijakan larangan *study tour* oleh Pemprov Jabar dapat dilihat sebagai respons cepat terhadap krisis, khususnya pasca kecelakaan bus yang menimbulkan kekhawatiran publik. Peristiwa tersebut menciptakan *policy window* atau jendela peluang kebijakan (Kingdon, 1984), yang dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya kebijakan baru dengan narasi perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan di tingkat daerah telah memasuki tahap implementasi yang tegas.

Sementara itu, pendekatan Kemendikdasmen justru berada pada tahap formulasi yang lebih fleksibel dan dialogis. Pemerintah pusat tidak secara eksplisit melarang *study tour*, tetapi menekankan pentingnya protokol keselamatan dan kelayakan kegiatan. Pendekatan ini lebih merepresentasikan perhatian terhadap dimensi pedagogis dan karakter pembelajaran, sebagaimana ditekankan dalam kebijakan Merdeka Belajar dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Dilihat dari perspektif *Intergovernmental Relations* dalam sistem desentralisasi pendidikan Indonesia, perbedaan kebijakan ini memperlihatkan adanya kesenjangan koordinasi vertikal antara pusat dan daerah. Ketidaksinkronan ini berdampak pada kebingungan di tingkat satuan pendidikan, yang harus memilih

antara kepatuhan administratif terhadap kebijakan daerah atau optimalisasi potensi pembelajaran melalui pengalaman langsung yang dianjurkan oleh pusat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya dialog kebijakan yang lebih terkoordinasi antara berbagai level pemerintahan agar tidak menimbulkan konflik interpretasi dan hambatan dalam implementasi di lapangan.

Secara pedagogis, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan *Experiential Learning Theory* (Kolb, 1984) memberikan dasar bahwa kegiatan *study tour* dapat menjadi strategi efektif dalam membangun makna belajar, kolaborasi sosial, dan penguatan karakter. Namun demikian, agar efektif, kegiatan ini harus didesain dengan memperhatikan keamanan, relevansi konteks, dan kemampuan ekonomi peserta didik. Dalam praktiknya, ketidakhadiran pedoman teknis dan kebijakan yang harmonis telah memunculkan kebingungan serta ketimpangan akses, terutama bagi sekolah dengan keterbatasan sumber daya.

Dalam kerangka Teori Kritis, munculnya larangan terhadap *study tour* juga dapat dibaca sebagai upaya membendung praktik komersialisasi pendidikan yang berpotensi menciptakan ketimpangan akses. *Study tour* yang dikelola oleh pihak ketiga dan berbiaya tinggi menyingkirkan kelompok siswa dari latar belakang ekonomi rendah, menciptakan bentuk eksklusi sosial yang tersembunyi. Kebijakan pembatasan Pemprov Jabar dalam hal ini merepresentasikan usaha untuk menekan ekses kapitalisasi pendidikan. Namun demikian, jika kebijakan ini tidak dibarengi dengan tawaran alternatif yang edukatif dan setara, justru dapat membatasi hak belajar

siswa dalam aspek pengalaman dan konteks.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan juga memperkuat bahwa praktik pendidikan membutuhkan kebijakan yang adaptif dan realistik. Sebagian besar kepala sekolah dan guru menyuarakan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran di luar kelas, selama dilakukan dengan biaya yang terjangkau, memiliki nilai edukatif yang jelas, dan menjamin keselamatan siswa. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan di lapangan bersifat kontekstual, dan kebijakan yang terlalu umum atau bersifat larangan total dapat mengabaikan keragaman kebutuhan dan kapasitas satuan pendidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, arah kebijakan *study tour* di masa depan seharusnya tidak berfokus pada pelarangan total, melainkan pada redefinisi konsep dan mekanisme pelaksanaannya. *Study tour* perlu direformulasi menjadi kegiatan kunjungan edukatif yang murah, relevan, aman, dan inklusif. Pemerintah pusat dan daerah perlu berperan sebagai fasilitator dan kolaborator, bukan semata regulator, dalam menyusun pedoman teknis yang jelas yang mendukung pembelajaran kontekstual dan pengembangan karakter secara merata. Kebijakan pendidikan yang ideal adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan dimensi pedagogis, sosial, dan ekonomi secara seimbang, serta berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pendidikan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *study tour* yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dan panduan alternatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

mencerminkan perbedaan pendekatan dalam merespons isu pendidikan berbasis pengalaman. Melalui pendekatan *Policy Cycle Theory* dan *Multiple Streams Framework*, diketahui bahwa kebijakan larangan di tingkat daerah muncul sebagai respons cepat terhadap krisis yang menciptakan jendela peluang kebijakan, sementara di tingkat pusat, kebijakan masih berada pada tahap formulasi dan bersifat lebih fleksibel.

Dalam perspektif desentralisasi dan hubungan antar pemerintahan (*Intergovernmental Relations*), perbedaan ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketegangan dalam implementasi. Di sisi lain, teori *Contextual Teaching and Learning* dan *Experiential Learning* menggarisbawahi bahwa kegiatan *study tour* memiliki potensi besar sebagai metode pembelajaran yang efektif, namun perlu direformulasi agar tidak menimbulkan beban finansial dan risiko keselamatan.

Dari sudut pandang Teori Kritis, *study tour* yang bersifat komersial menciptakan ketimpangan akses pendidikan, sehingga kebijakan pelarangan dapat dimaknai sebagai upaya mengurangi eksklusi sosial. Namun, larangan tanpa alternatif justru berpotensi menghambat hak belajar siswa secara setara. Hasil survei juga mengindikasikan adanya perbedaan pandangan di kalangan praktisi pendidikan, di mana sebagian besar mendukung kegiatan di luar kelas dengan catatan biaya terjangkau, aman, dan memiliki tujuan edukatif yang jelas.

Oleh karena itu, arah kebijakan *study tour* ke depan seharusnya tidak mengarah pada pelarangan total, tetapi pada redefinisi konsep dan pelaksanaannya menjadi kunjungan edukatif yang murah, relevan, aman, dan inklusif. Pemerintah, baik pusat

maupun daerah, perlu berperan sebagai fasilitator dalam merumuskan pedoman teknis yang mendukung kebijakan pembelajaran kontekstual yang adil bagi semua siswa. Kebijakan pendidikan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pedagogis, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka yang integratif dan berpihak pada keadilan.

Daftar Pustaka

- Afrizal, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. ". PT Raja Grafindo.
- Anggraini, T., & Ulfa, S. W. (2022). The Influence of Contextual Teaching and Learning (CTL) Models on Student Activities and Learning Outcomes on Plant Seeds Material in First Grade (X Class) Senior High School. *Jurnal Pembelajaran Dan Biologi Nukleus*, 8(2), 470–480.
- Apple, M. W. (2019). *Critical education, critical theory, and the critical scholar/activist*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Ayoub Mahmoudi, D., Khoshnood, A., & Babaei, A. (2014). Paulo Freire's critical pedagogy and its implications in curriculum planning. *Journal of Education and Practice*, 5(14), 86–91.
- Bafadal, M. F. (2019). The Effect of Study Tour Activity in Teaching Junior High School Students Speaking Skill. *Linguistics and ELT Journal*, 6(1), 11–19.
- Benadusi, L. (2001). Equity and Education: a critical review of sociological research and thought. In *Pursuit of Equity in Education: Using International Indicators to Compare Equity Policies*, 25–64.
- Bergh, A. (2015). Local educational actors doing of education—a study of how

- local autonomy meets international and national quality policy rhetoric. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 2015(2), 28146.
- Dabamona, S. (2020). *School trips and experiential learning in eastern Indonesia*. Swansea University.
- Djafar, F., & Ap, S. (2024). *Teori administrasi publik pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hains-Wesson, R., & Appleby, M. (2017). A perspective on third-party providers and *study tour* programs: A mixed method study. *Issues in Educational Research*, 27(3), 435–452.
- Ibrahim, E. (2021). Mengenal sejarah otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 90–97.
- Leong, F. F. (2024). Research on Macao Study Tour Policy and Cross-strait Cultural Construction on the Macao Local Government Cultural Industry—Taking the “Ten Thousand Persons Plan.” *Lex Localis*, 22(4), 372–408.
[https://doi.org/10.52152/22.4.372-408\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.4.372-408(2024))
- Imam Gunawan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Imanirih, D. (2015). Local Ownership of Education Policies at the Crossroads between the Active Participation and the Passive Compliance to International Goals. *Journal of Education and Practice*, 6(2), 45–52.
- Inglis, P. (2023). Critical approaches to private education in the Global South. *Sociology Compass*, 17(5), e13080.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2017). Theories of the policy cycle. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 69–88). Routledge.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.
- Lexy J. Moeleong. (2023). *Metodologi penelitian*. Laksana.
- Malandrino, A. (2023). Adopting the Multiple Streams Framework to Understand the Preconditions of Policy Decisions. In *Migrant Languages in Education: Problems, Policies, and Politics* (pp. 27–37). Springer.
- Mariani, E. (2020). *Pemikiran Henry A. Giroux tentang Pendidikan Kritis, Peran Guru sebagai Intelektual Transformatif dan Relevansinya bagi Pembelajaran pada Sekolah di Indonesia*. Driyarkara School of Philosophy.
- Marpaung, M., Trihayuningtyas, E., & Suryadana, M. L. (2022). THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL TOURISM DEVELOPMENT BY DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA:(A CASE STUDY OF PURWAKARTA MUSEUMS). *International Journal of Sustainable Competitiveness on Tourism*, 1(02), 17–25.
- Meral, E. O., van Beest, I., & Karaduman, C. (2023). Raising awareness about social exclusion in schools through experiential learning. *Social Psychology of Education*, 26(2), 367–381.
- Miao, S. Y., & Harris, R. (2012). Learning and personality on study tours abroad. *Research in Post-Compulsory Education*, 17(4), 435–452.
- Müller-Doohm, S. (2017). Member of a school or exponent of a paradigm? Jürgen Habermas and critical theory. *European Journal of Social Theory*, 20(2), 252–274.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarrahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi,

- F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Pierce, J. J., Giordono, L. S., Peterson, H. L., & Hicks, K. C. (2022). Common approaches for studying advocacy: Review of methods and model practices of the Advocacy Coalition Framework. *The Social Science Journal*, 59(1), 139–158.
- Powell, M., & Mannion, R. (2022). Modelling the health policy process: one size fits all or horses for courses? *International Journal of Health Policy and Management*, 12, 7580.
- Rahmatunnisa, M., Hindersah, R., & Achmad, T. H. (2018). Why Regions with Archipelagic Characteristics in Indonesia Also Need Asymmetric Decentralization? *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 251–261.
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*.
- Ryoo, J. J., & Crawford, J. (2023). *Critical theory in qualitative research in education*.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In *Theories of the policy process, second edition* (pp. 189–220). Routledge.
- Setyosari, H. P. (2016). *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media.
- Simatele, M. (2022). The Intersection of Social Inequities and Marginalization in Education: Towards a Praxis. In *Global Perspectives on Microaggressions in Higher Education* (pp. 105–124). Routledge.
- Stoker, G. (1995). Intergovernmental relations. *Public Administration*, 73(1), 101–122.
- Strunk, K. K., & Betties, J. S. (2019). Using critical theory in educational research. *Research Methods for Social Justice and Equity in Education*, 71–79.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Edisi IV*. alfabeta.
- Sun, F.-R., & Xu, T.-Z. (2021). The study tour in China: An emerging mode for practical education. *Sustainability*, 13(21), 11969.
- Swanson, T. (2022). Enhancing Student Experiences Outside the Classroom: Industry Tour and Study Abroad Opportunities. *JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE*, 100, 122.
- Weible, C. M., & Jenkins-Smith, H. C. (2016). The advocacy coalition framework: An approach for the comparative analysis of contentious policy issues. In *Contemporary approaches to public policy: Theories, controversies and perspectives* (pp. 15–34). Springer.
- Zen, M., Supiyandi, S., Rizal, C., Rahman, S., & Irwan, I. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Study Tour Menggunakan Metode TOPSIS. *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, 9(6), 2141–2149.
- Zhu, Z., Zhou, J., Kang, Y., & Zhang, X. (2021). *Analyzing Policy Documents of Labor Education and Study Tour in China BT - Artificial Intelligence in Education and Teaching Assessment* (W. Wang, G. Wang, X. Ding, & B. Zhang (eds.); pp. 9–23). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6502-8_2
- Zohlnhöfer, R., Herweg, N., & Zahariadis, N. (2022). How to conduct a multiple streams study. In *Methods of the policy process* (pp. 23–50). Routledge.

